



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2021



Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

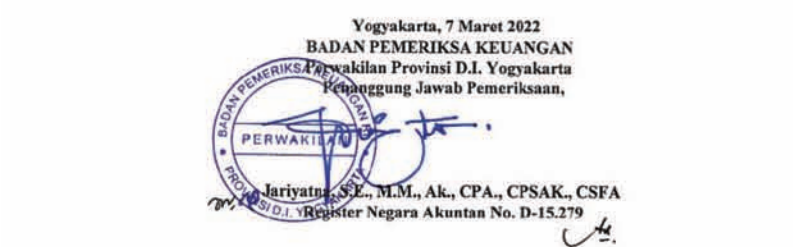
Pemerintah Kabupaten Sleman bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung Jawab BPK Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan pe nyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sleman. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sleman serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan per undang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 01/LHP/XVIII.YOG/03-2022 tanggal 7 Maret Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020				
No	Uraian	Reff	2021	2020
1	ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI	5.5.1		
2	ARUS MASUK KAS			
3	Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah		511.407.257.119,00	499.961.975.136,00
4	Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah		38.699.706.039,00	40.971.519.904,00
5	Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		38.164.197.265,08	47.565.772.690,28
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		214.663.756.977,00	199.223.383.209,45
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		71.907.299.430,00	59.999.743.515,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		925.964.567.000,00	938.351.449.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		60.035.691.900,00	52.647.774.572,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		308.701.084.849,00	220.980.544.863,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		36.985.385.000,00	73.459.098.000,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
13	Penerimaan Dana Keistimewaan		0,00	0,00
14	Penerimaan Dana Desa		110.556.360.000,00	0,00
15	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi		233.854.622.951,00	223.286.778.345,00
16	Penerimaan Bantuan Keuangan		220.372.562.236,50	48.418.617.245,00
17	Penerimaan Pendapatan Hibah		10.920.671.000,00	135.660.122.645,00
18	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		10.350.775.540,00	0,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas		2.792.523.943.315,58	2.540.526.779.124,73
21	ARUS KELUAR KAS			
22	Belanja Pegawai		1.023.352.810.090,79	1.147.357.459.793,51
23	Belanja Barang dan Jasa		809.140.794.285,79	597.782.876.331,94
24	Belanja Bunga		0,00	89.787.135,00
25	Belanja Hibah		98.348.312.974,13	153.744.141.147,56
26	Belanja Subsidi		0,00	0,00
27	Belanja Bantuan Sosial		19.104.405.028,00	53.395.042.950,00
28	Belanja Tak Terduga		27.614.828.647,00	20.161.477.613,00
29	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa		56.636.670.393,00	50.698.247.953,00
30	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		292.469.800,00	0,00
31	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		119.957.190,00	105.140.870,00
32	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi		247.002.744.460,00	147.768.267.300,00
33	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		305.550.707.713,00	303.101.841.633,00
34	Jumlah Belanja Transfer		3.063.792.544.726,01	2.714.312.898.539,54
35	Jumlah BELANJA		0,00	0,00
36	SURPLUS/DEFISIT		(366.457.060.068,01)	79.015.486.095,04
37	PEMBIAYAAN	5.1.3		
38	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1		
39	Penggunaan SILPA		380.553.060.068,01	380.545.812.168,92
40	Penerimaan Dana Cadangan		0,00	0,00
41	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		0,00	0,00
42	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah		0,00	0,00
43	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
44	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
45	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
46	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
47	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
48	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
49	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
50	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
51	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
52	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
53	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
54	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
55	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
56	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
57	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
58	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
59	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
60	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
61	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
62	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
63	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
64	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
65	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
66	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
67	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
68	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
69	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
70	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
71	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
72	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
73	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
74	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
75	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
76	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
77	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
78	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
79	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
80	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
81	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
82	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
83	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
84	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
85	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
86	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
87	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
88	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
89	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
90	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
91	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
92	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
93	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
94	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
95	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
96	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
97	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
98	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
99	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
100	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN LAPORAN REALISASI APBD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	URAIAN	Reff	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	488.000.000.000,00	511.407.257.119,00	104,76	499.961.975.136,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	39.429.475.340,00	38.699.706.039,00	98,15	40.971.519.904,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.1.1.1.c	38.726.973.911,00	38.164.197.265,08	98,55	47.565.772.690,28
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	204.328.574.200,00	215.408.198.296,00	105,42	199.747.474.697,45
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1	770.675.023.451,00	803.679.358.719,08	104,28	788.246.742.427,73
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
10	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2.a				
11	PERMINTAHAN PUSAT - DANA PERMINTAHAN	5.1.1.2.a.1	47.587.894.000,00	71.907.299.430,00	151,10	59.999.743.515,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.2	925.964.567.000,00	925.964.567.000,00	100,00	938.351.449.000,00
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.a.3	64.676.904.000,00	60.035.691.900,00	92,82	52.647.774.572,00
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.a.4	310.728.965.950,00	308.701.084.849,00	99,35	220.980.544.863,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	5.1.1.2.a	1.348.958.270.950,00	1.366.608.643.179,00	101,31	1.271.979.511.950,00
16						
17	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2.b				
18	PERMINTAHAN PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.b.1	36.985.385.000,00	36.985.385.000,00	100,00	73.459.098.000,00
19	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.b.2	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.b.3	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dana Keistimewaan	5.1.1.2.b.4	110.556.360.000,00	110.556.360.000,00	100,00	0,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.b	147.541.745.000,00	147.541.745.000,00	100,00	73.459.098.000,00
23						
24	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.c				
25	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.c.1	199.084.687.853,00	233.854.622.951,00	117,46	223.286.778.345,00
26	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.c.2	224.421.655.099,00	220.372.562.236,50	98,20	48.418.617.245,00
27	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.c	423.506.342.952,00	454.227.185.187,50	107,25	271.706.395.590,00
28	Total Pendapatan Transfer		1.920.006.358.908,00	1.968.377.573.366,50	102,52	1.617.144.005.540,00
29						
30	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.3				
31	YANG SAH					
32	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	6.654.102.299,00	10.920.671.000,00	164,12	135.660.122.645,00
33	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	0,00	10.350.775.540,00	100,00	0,00
35	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.1.1.3	6.654.102.299,00	21.271.452.540,00	319,27	135.660.122.645,00
36	JUMLAH PENDAPATAN		2.697.335.484.658,00	2.793.328.384.634,58	103,56	2.541.050.870.612,73
37	BELANJA	5.1.2				
38	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
39	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.179.160.092.136,00	1.023.352.810.090,79	86,79	1.147.357.459.793,51
40	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	942.731.487.459,01	809.140.794.285,79	85,83	597.782.876.331,94
41	Belanja Bunga	5.1.2.1.c	0,00	0,00	0,00	89.787.135,00
42	Belanja Subsidi	5.1.2.1.d	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Hibah	5.1.2.1.e	106.058.125.234,00	98.348.312.974,13	92,73	153.744.141.147,56
44	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	24.115.145.144,00	19.104.405.028,00	79,22	53.395.042.950,00
45	Jumlah Belanja Operasi	5.1.2.1	2.252.064.849.973,01	1.949.946.322.378,71	86,58	1.982.369.307.368,01
46						
47	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
48	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	204.822.813.324,00	201.823.474.555,00	98,54	45.182.640.674,00
49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	96.926.732.614,00	85.580.505.110,57	88,29	90.665.837.861,36
50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	40.257.365.750,00	37.993.884.789,85	94,38	148.407.029.489,42
51	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	106.953.791.255,00	101.031.883.290,41	94,46	38.905.559.000,98
52	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	8.148.232.030,00	7.220.158.135,00	88,61	37.905.701.065,82
53	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.f	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Jumlah Belanja Modal	5.1.2.2	457.108.938.973,00	433.649.905.880,83	94,87	361.066.768.091,58
55						
56	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
57	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.a	49.068.048.067,00	27.614.828.647,00	56,28	20.161.477.613,00
58	Jumlah Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	49.068.048.067,00	27.614.828.647,00	56,28	20.161.477.613,00
59						
60	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
61	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.a	58.135.536.263,00	56.636.670.393,00	97,42	50.698.247.953,00
62	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.b	292.469.800,00	292.469.800,00	100,00	0,00
63	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	5.1.2.4.c	119.957.190,00	119.957.190,00	100,00	105.140.870,00
64	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.d	247.002.744.460,00	246.052.744.250,00	99,62	147.768.267.300,00
65	Jumlah Belanja Transfer	5.1.2.4	305.550.707.713,00	303.101.841.633,00	99,20	198.571.656.123,00
66	JUMLAH BELANJA		3.063.792.544.726,01	2.714.312.898.539,54	88,59	2.532.169.209.185,99
67						
68	SURPLUS/DEFISIT	5.1.2.5	(366.457.060.068,01)	79.015.486.095,04	21,56	8.881.661.427,14
69						
70	PEMBIAYAAN	5.1.3				
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
72	Penggunaan SILPA	5.1.3.1.a	380.553.060.068,01	380.545.812.168,92	100,00	398.584.982.878,78
73	Penerima Dana Cadangan	5.1.3.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Hasil Pengyalan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.3.1.c	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	5.1.3.1.d	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.1.e	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	5.1.3.1.f	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.3.1.g	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	5.1.3.1.h	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.i	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	5.1.3.1.j	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.1.3.1	380.553.060.068,01	380.545.812.168,92	100,00	398.584.982.878,78
83						
84	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
85	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.a	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.b	14.096.000.000,00	14.096.000.000,00	100,00	23.044.201.137,00
87	Penyertaan Modal dari Pemerintah Pusat	5.1.3.2.c	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.2.d	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	5.1.3.2.e	0,00	0,00	0,00	3.876.631.000,00
90	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.3.2.f	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	5.1.3.2.g	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.2.h	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	5.1.3.2.i	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.1.3.2	14.096.000.000,00	14.096.000.000,00	100,00	26.920.832.137,00
95	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.3.3	366.457.060.068,01	366.449.812.168,92	100,00	371.664.180.741,78
96						
97	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.4	0,00	445.465.298.263,96	100,00	380.545.812.168,92